

# IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 1529/MENKES/SK/X/2010 TENTANG PEDOMAN UMUM PENGEMBANGAN KELURAHAN SIAGA AKTIF DI KELURAHAN SAMBONGJAYA KECAMATAN MANGKUBUMI KOTA TASIKMALAYA

Anggi Anisa Maulina  
Ilmu Administrasi Negara, STIA YPPT Priatim Tasikmalaya  
[Anggianisa22@gmail.com](mailto:Anggianisa22@gmail.com)

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Implementasi Kebijakan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1529/MENKES/SK/X/2010 Tentang Pedoman Umum Pengembangan Kelurahan Siaga Aktif di Kelurahan Sambongjaya Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya”. Pengambilan Judul ini di latar belakang karena pelaksanaan program kelurahan siaga aktif belum maksimal sesuai dengan Pedoman Umum Pengembangan Kelurahan Siaga Aktif. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi Program Kelurahan Siaga Aktif bagi masyarakat di Kelurahan Sambongjaya Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif, bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang pertanyaan penelitian, mengidentifikasi secara sistematis dan menginterpretasikan data yang ada. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah melalui wawancara dengan beberapa informan yang diyakini dapat memberikan informasi yang jelas tentang pelaksanaan program Kelurahan Siaga Aktif. Selain wawancara, studi observasi dan dokumentasi dilakukan untuk mendukung data wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengembangan kelurahan siaga aktif lebih baik. Beberapa faktor yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn, yaitu ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan, sumber kebijakan, karakteristik instansi/badan pelaksana, kecenderungan pelaksana (*implementors*), komunikasi antar organisasi, kondisi ekonomi, sosial dan politik, ditunjukkan berdasarkan observasi dan wawancara dan kegiatan pelaksanaan.

**Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, Kelurahan Siaga Aktif**

## ABSTRACT

*This thesis is entitled "The Policy Implementation of the Decree of the Minister of Health Number 1529/MENKES/SK/X/2010 concerning General Guidelines for the Development of Active Alert Villages in Sambongjaya Village, Mangkubumi District, Tasikmalaya City". Taking this title in the background because the implementation of the active standby village program has not been maximized in accordance with the General Guidelines for Active Alert Village Development. This study aims to describe and analyze the implementation of the Active Alert Village Program for the community in Sambongjaya Village, Mangkubumi District, Tasikmalaya City. there is. The technique used to collect data is through interviews with several informants who are believed to be able to provide clear information about the implementation of the Active Alert Village program. In addition to interviews, observational and documentation studies were conducted to support the interview data. The results showed that the implementation of the development of the active standby village was better. Several factors were put forward by Van Meter and Van Horn, namely the basic measures and policy objectives, policy sources, characteristics of implementing agencies/agencies, tendencies of implementers, communication between organizations, economic, social and political conditions, shown based on observations. and interviews and implementation activities.*

**Keywords : Implementation, Policy, Active Alert Village**

## PENDAHULUAN

Indonesia menjadi salah satu negara yang paling banyak kepulauannya, dengan beribu-puluhan yang tersebar di seluruh penjuru Nusantara. Tentu, dalam hal ini, pemerintah memiliki tugas dan tanggungjawab yang besar terhadap setiap individu yang hidup di negeri ini. Dalam

proses pemerintahannya, para stakeholder negara memiliki kewajiban untuk menjamin keamanan, kesehatan serta kesejahteraan masyarakat. Agar cita-cita tersebut tercapai, pemerintah tentu perlu memiliki strategi tersendiri dalam menjalankan kewajibannya.

Strategi yang dibangun oleh pemerintah ini dibuat sehingga membentuk suatu program-program yang nantinya diharapkan mampu diimplementasikan dengan baik oleh para 'eksekutor' yang berwenang. Dalam hal ini, peneliti mengangkat sebuah fenomena yang berkaitan dengan program pemerintah dalam sektor kesehatan dan pemberdayaan masyarakat. Program pemerintah ini disebut sebagai Kelurahan Siaga Aktif yang mana program ini mulai dijalankan oleh pemerintah pada tahun 2010 mengacu pada Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1529/MENKES/SK/X/2010 tentang Pedoman Umum pengembangan Kelurahan Siaga Aktif. Maka dari itu, masyarakat harus ikut berpartisipasi aktif dalam menyukseskan program ini. Walaupun, program Kelurahan Siaga Aktif ini dijalankan oleh pihak kelurahan atau desa.

Pelaksanaan program Kelurahan Siaga Aktif memerlukan kerjasama dari berbagai pemangku kepentingan antara lain perangkat desa, tokoh masyarakat, petugas kesehatan, pemuda, LSM (lembaga swadaya masyarakat) dan seluruh anggota masyarakat. Kelurahan Siaga Aktif merupakan salah satu bentuk pengembangan Kelurahan Siaga Aktif, dimana warga memiliki akses yang mudah terhadap pelayanan kesehatan dasar melalui sarana kesehatan sehari-hari. Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Sambongjaya Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya. Maka penulis merumuskan masalah Bagaimanakah Implementasi Kebijakan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1529/MENKES/SK/X/2010 Tentang Pedoman Umum Pengembangan Kelurahan Siaga Aktif di Kelurahan Sambongjaya Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya.

Adapun permasalahan terkait implementasi kebijakan yang mendasar, yaitu:

1. Sehubungan dengan ukuran-ukuran Standar dan Tujuan Kebijakan mengingat identifikasi indikator yang menentukan kinerja kebijakan, identifikasi kinerja indikator merupakan tahap yang sangat penting dalam analisis. Dalam Fenomena ini misalnya pada kegiatan atau program rutin posyandu dalam proses administrasi berusaha memanfaatkan kader kesehatan PKK yang bertujuan untuk mengikutsertakan masyarakat yang ingin ikut andil dalam proses terwujudnya standar dan tujuan kebijakan.
2. Mengenai sumber-sumber kebijakan, Sumber daya ini termasuk dana atau insentif lain dalam program yang dapat mendorong atau memfasilitasi implementasi yang efektif. Dalam fenomena ini sumberdaya yang dimaksud berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya manusia dan juga pemanfaatan APBN/APBD. Pencapaian Tujuan Kebijakannya belum sesuai dengan Tujuan Umum dan Tujuan Khusus sesuai dengan Pedoman Umum Desa dan Kelurahan Siaga Aktif.
3. Terkait komunikasi antar organisasi dan kegiatan penegakan, sangat penting untuk memperhatikan kejelasan standar dan tujuan, keakuratan komunikasi mereka kepada pelaksana dan konsistensi yang ada yang dikomunikasikan oleh berbagai sumber komunikasi. Mengenai fenomena ini komunikasi antar organisasi yang dimaksud yaitu pihak Kelurahan kepada Puskesmas.
4. Mengenai karakter instansi pelaksana, hal ini termasuk kedalam politik organisasi yang mana faktor ini termasuk kedalam karakteristik lembaga administratif yang mempengaruhi kinerja kebijakan. Dalam fenomena ini peneliti mencoba mengidentifikasi karakteristik lembaga administratif dalam hal ini Kelurahan.
5. Kondisi ekonomi, sosial, dan politik menjadi pengaruh kepada kebijakan publik dan mempengaruhi variabel pada lingkungan ini. Dalam fenomena ini stabilitas kondisi ekonomi sosial dan politik menjadi hal yang sangat penting pada suatu kebijakan dan proses implementasinya terkhusus pada Program Kelurahan Siaga Aktif.
6. Disposisi Pelaksana, Faktor-faktor tersebut mempengaruhi kemampuan dan kemauan untuk mengimplementasikan kebijakan. Pemahaman kebijakan, Arah tanggapan mereka terhadap penerimaan, netralitas, penolakan dan intensitas merupakan respon pelaksana

terhadap kemampuan dan kemauan. Fenomena ini bisa dilihat ketika bagaimana ketua pelaksana program tersebut mampu mempengaruhi kemampuan dan kemauan terhadap kebijakan yang dilaksanakan serta bagaimana respon yang dihasilkan dari kebijakan yang dilaksanakan dalam konteks ini dalam Program Kelurahan Siaga Aktif.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **1. Kebijakan**

Menurut (Winarno, 2014, hal. 17) Kebijakan adalah keputusan yang memberi wewenang kepada pejabat untuk membuat kepentingan umum, dan keputusan tersebut dilaksanakan sedemikian rupa sehingga dianggap sebagai konsekuensi logis dalam tindakan dan pernyataan dari pemerintah. Kebijakan memberikan solusi untuk masalah saat ini. Di samping itu, Kebijakan adalah cara untuk memecahkan masalah yang muncul di masyarakat. Kebijakan tersebut bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada secara menyeluruh, Tidak memecahkan masalah dengan menciptakan yang baru. tetapi, Dengan kebijakan, masalah yang ada diselesaikan dan menjadi memecahkan masalah ini.

Menurut (Suharto, 2005, hal. 7) Kebijakan adalah prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan Keputusan. Menurut Ealau dan keneth Prewitt yang dikutip Charles O. Jones (Suharno, 2010) Kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku yang dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang baik dari yang membuatnya maupun menaatinya yang terkena kebijakan itu.

### **2. Kebijakan Publik**

Menurut (Winarno, 2014, hal. 25) Kebijakan publik adalah keputusan komitmen yang dibuat oleh badan publik pada tingkat strategis atau struktural. Sebagai keputusan yang mengikat publik, kebijakan publik harus dilakukan oleh otoritas politik, mereka yang menganut ketertiban umum atau yang sering melakukan prosedur pemilihan atas nama rakyat. Selain itu, kebijakan publik dilaksanakan oleh penyelenggara negara di bawah arahan pejabat, dan tujuan utama kebijakan publik negara modern adalah kebijakan publik, atau pelayanan. Kebijakan publik adalah apa yang dapat dilakukan suatu negara untuk mempertahankan atau meningkatkan kualitas hidup warganya.

Menurut Mustopadidjaja (Kusnandar, 2010, hal. 9) Kebijakan publik pada dasarnya adalah suatu keputusan yang dimaksudkan untuk mengatasipermasalahan tertentu, untuk melakukan kegiatan tertentu atau untuk mencapai tujuan tertentu, yang dilakukan oleh instansi yang berkewenangan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan negara dan pembangunan.

### **3. Tahapan-Tahapan Kebijakan**

#### **a. Penyusunan Agenda**

Isu-isu bersaing sebelum dimasukkan ke dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa isu dibawa ke agenda kebijakan para pembuat kebijakan. Pada titik ini, masalah mungkin tidak disentuh sama sekali, dan beberapa diskusi tentang topik itu mungkin tertunda untuk waktu yang lama, itu adalah fase yang menentukan sebaliknya.

#### **b. Tahap Formulasi Kebijakan**

Isu-isu dalam agenda kebijakan dibahas oleh pembuat kebijakan. Masalah-masalah ini didefinisikan untuk mencari solusi alternatif terbaik untuk masalah tersebut. Solusi dari masalah ini datang dari berbagai alternatif yang ada. Pada tahap pengembangan strategi ini, semua alternatif dilombakan untuk dipilih sebagai strategi untuk memecahkan masalah. Selama fase ini, setiap aktor "bermain" dan mengusulkan solusi terbaik untuk masalah tersebut.

#### **c. Tahap Adopsi Kebijakan**

Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang diajukan oleh para pembuat kebijakan, satu alternatif kebijakan pada akhirnya ditentukan oleh dukungan mayoritas legislatif, melalui konsensus di antara direktur lembaga, atau dengan keputusan pengadilan.

#### **d. Tahap Implementasi Kebijakan**

Suatu program menjadi rekor elit hanya jika tidak dilaksanakan. Berbagai kepentingan dapat bersaing satu sama lain selama fase ini, dengan beberapa implementasi kebijakan didukung oleh pelaksana dan lainnya ditolak oleh pelaksana.

e. Tahap Evaluasi Kebijakan

Pada tahap ini, kebijakan yang diimplementasikan dievaluasi atau dinilai untuk melihat seberapa baik kebijakan yang diterapkan menyelesaikan masalah. Pada prinsipnya, kebijakan publik berfungsi untuk mencapai efek yang diinginkan. Oleh karena itu, ia menetapkan perilaku atau kriteria yang mendasari untuk mengevaluasi apakah kebijakan publik memiliki efek yang diinginkan.

4. Implementasi Kebijakan

Menurut (Winarno, 2014, hal. 151) Implementasi kebijakan adalah proses manajemen dan operasional yang terjadi setelah kebijakan ditetapkan dan disetujui. Kegiatan ini terletak di antara perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan. Implementasi kebijakan mencakup logika top-down. Artinya, interpretasi alternatif abstrak atau makro direduksi menjadi alternatif konkrit atau mikro. Pembuatan kebijakan memiliki logika bottom-up dalam arti bahwa prosesnya dimulai dengan identifikasi pemenuhan kebutuhan publik atau lingkungan, diikuti dengan pencarian dan pemilihan alternatif solusi yang diusulkan untuk identifikasi.

5. Program Kelurahan Siaga Aktif

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1529/MENKES/SK/X/2010 tentang Pedoman Pengembangan kelurahan siaga aktif, Kelurahan Siaga Aktif memiliki komponen :

- a. Pelayanan kesehatan dasar
- b. Pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan UKBM dan mendorong upaya surveilans berbasis masyarakat, kedaruratan kesehatan dari penganggulangan bencana, serta penyehatan lingkungan.
- c. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)

Kelurahan Siaga Aktif adalah desa atau yang disebut dengan nama lain atau kelurahan, yang:

- a. Penduduknya dapat mengakses dengan mudah pelayanan kesehatan dasar yang memberikan pelayanan setiap hari melalui Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) atau sarana kesehatan yang ada di wilayah tersebut seperti, Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu (Pustu), Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) atau sarana kesehatan lainnya.
- b. Penduduknya mengembangkan UKBM dan melaksanakan surveilans berbasis masyarakat (meliputi pemantauan penyakit, kesehatan ibu dan anak, gizi, lingkungan dan perilaku), kedaruratan kesehatan dan penanggulangan bencana, serta penyehatan lingkungan sehingga masyarakatnya menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

Model pendekatan implementasi kebijakan yang dirumuskan Van Meter dan Van Horn (Winarno, 2014, hal. 158-168) disebut dengan *A Model of the Policy Implementation*, Variabel-variabel tersebut yaitu:

1. Standar dan Tujuan Kebijakan

Ketika melakukan studi implementasi, tujuan dan sasaran dari suatu program yang akan dilaksanakan harus ditetapkan dan diukur karena implementasi tidak dapat berhasil atau gagal tanpa memperhitungkan tujuan tersebut. Tindakan dasar dan pengaturan target dasar dapat menggunakan pernyataan keputusan seperti yang diungkapkan dalam banyak dokumen seperti peraturan dan kebijakan program yang menetapkan kriteria untuk mengevaluasi implementasi kebijakan.

2. Sumber Kebijakan

Sumber daya yang tersedia untuk dihitungkankan saat menerapkan kebijakan. Sumber informasi harus diperhatikan karena mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya ini dapat mencakup insentif keuangan atau program lain yang dapat mendorong atau memfasilitasi implementasi yang efektif.

3. Komunikasi antar organisasi dan kegiatan penegakan

Implementasi yang efektif membutuhkan pemahaman yang jelas oleh mereka yang bertanggung jawab untuk mencapai standar dan tujuan program. Oleh karena itu, sangat penting untuk memperhatikan kejelasan standar dan tujuan, ketepatan komunikasinya kepada pelaksana, dan konsistensi (atau keseragaman) informasi yang ada dikomunikasikan melalui sumber informasi yang berbeda.

#### 4. Karakteristik lembaga pelaksana

Mengingat karakteristik lembaga pelaksana, pembahasan ini tidak bisa dilepaskan dari penyakit birokrasi. Birokrasi didefinisikan sebagai karakteristik, norma, dan pola hubungan yang berulang dalam institusi. Memiliki hubungan aktual atau potensial dengan apa yang mereka miliki dalam mengimplementasikan kebijakan. Komponen model mencakup karakteristik struktural formal suatu organisasi dan atribut informal perusahaan. Juga perlu diperhatikan hubungan antara badan pelaksana dan aktor dalam sistem implementasi kebijakan.

#### 5. Kondisi Ekonomi, Sosial dan Politik

Dampak kondisi ekonomi, sosial dan politik terhadap kebijakan publik telah mendapat banyak perhatian selama dekade terakhir. Pendukung politik komparatif dan kebijakan publik sangat tertarik untuk menentukan dampak variabel lingkungan pada hasil kebijakan, meskipun dampak dari faktor-faktor ini pada pengambilan keputusan pembuat kebijakan menerima sedikit peringatan.

#### 6. Disposisi Pelaksana

Van Meter dan Van Horn menjelaskan bahwa implementasi kebijakan diawali dengan penyaringan terutama melalui persepsi dari mereka yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan sejauh mana kebijakan tersebut diimplementasikan. Ketiga unsur respon pelaksana tersebut dapat mempengaruhi kemampuan dan kemauan untuk mengimplementasikan kebijakan. Hal ini meliputi pemahaman (persepsi), pemahaman dan pendalaman kebijakan (pemahaman dan pemahaman), dan arah respon terhadap isu (penerimaan, netralitas, dll). Atau penolakan (penerimaan, netralitas, penolakan) dan intensitas terhadap kebijakan.

### **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan analisis kualitatif. Dari segi metode penelitian, penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan dan merangkum berbagai kondisi, situasi atau variabel yang terjadi di masyarakat yang menjadi subjek penelitian. Kemudian menggambar di permukaan sebagai fitur atau deskripsi dari beberapa kondisi, situasi atau variabel. Identifikasi informan dalam penelitian ini yaitu Sekretaris Kelurahan Sambongjaya, Ketua Pelaksana Program Kelurahan Siaga Aktif, Bidan Kelurahan Sambongjaya, Kader Pemberdayaan Masyarakat, dan Masyarakat Setempat Kelurahan Sambongjaya Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya.

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **1. Standar dan Tujuan Kebijakan**

Standar dan Tujuan kebijakan adalah indikator yang bertujuan dan standar kebijakan memberikan hasil program. Berkaitan dengan variabel standar dan tujuan kebijakan ini, penulis melakukan wawancara dengan beberapa informan yang telah ditentukan sebelumnya yang mengetahui tentang Program Kelurahan Siaga Aktif di Kelurahan Sambongjaya Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya. Adapun simpulan pertanyaan yang penulis tanyakan kepada informan, yaitu mengenai tujuan program ini. Informan yang dipilih yaitu Ketua Program Kelurahan Siaga Aktif di Kelurahan Sambongjaya Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya bahwa pada dasarnya memang sesuai dengan Tujuan yang ada di Pedoman Umum. Program ini juga sudah sesuai dengan lakjurdik nya memang dilaksanakan dan sudah ada hasil kerjanya dari masing-masing seksi dengan arah masing-masing seksi tadi yang ada 8 seksi yaitu forum masyarakat kelurahan, pelayanan kesehatan dasar, survey berbasis masyarakat, upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM), kegawatdaruratan bencana, kesehatan lingkungan,

PHBS dan Kadarzi. Dalam tinjauan ini, peneliti memanfaatkan tanda-tanda pencapaian program kelurahan siaga aktif untuk mensurvei sejauh mana prinsip dan tujuan program terpenuhi. Berikut delapan tanda keberhasilan program kelurahan siaga aktif:

- a. Adanya Kehadiran dan Kegiatan Diskusi Kelurahan..
- b. Ada Pejabat atau Unit Penguatan Daerah setempat.
- c. Kesederhanaan masyarakat untuk administrasi kesejahteraan dasar atau pengaturan administrasi sehari-hari.
- d. Kehadiran Upaya Kesehatan Bersumber Masyarakat
- e. Pembiayaan dapat diakses untuk kemajuan Kelurahan Siaga Aktif
- f. Kerja sama yang aktif dari masyarakat dan asosiasi masyarakat
- g. Ada pedoman kelurahan yang mendasari dan mengontrol peningkatan Kelurahan Siaga Aktif.
- h. Ada arahan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)

Mengingat Kebijakan dari faktor-faktor pencapaian Kelurahan Siaga Aktif yang ada di Kelurahan Sambongjaya Kecamatan Mangkubumi kota Tasikmalaya peneliti dapat menjelaskan bahwa kegiatan yang dilakukan sudah terlaksana dengan baik, adanya Puskesmas, Tenaga Kesehatan dan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat yaitu Pos Pelayanan Terpadu, posbindu serta posyandu remaja menunjukkan bahwa Kelurahan Sambongjaya merupakan Kelurahan yang mampu melaksanakan program pemerintah dan upaya peningkatan derajat Kesehatan masyarakat di Kelurahan Sambongjaya telah mencapai indikator keberhasilan Program Kelurahan Siaga Aktif mengingat pelatihan masing-masing bagian dan kegiatan yang dilakukan.

## **2. Sumber Kebijakan**

Sumber kebijakan pelaksanaan program kelurahan siaga aktif di Kelurahan Sambongjaya meliputi pendanaan, sumber daya manusia, dan sarana prasarana. Berhubungan dengan variabel ini, berikut hasil wawancara yang telah dilakukan dengan informan yang telah ditunjuk sebagai berikut :

- a. Sumber Pendanaan pelaksanaan kelurahan siaga aktif yang beroperasi di Kelurahan Sambongjaya.
- b. Sumber Daya Manusia yaitu para pengurus kelurahan siaga aktif yang sudah ditunjuk dan ditugaskan sesuai dengan Keputusan Lurah Sambongjaya Nomor 440/Kep.11A/Kel.Sbj Tahun 2019 Tentang Pembentukan Kelurahan Siaga Aktif Kelurahan Sambongjaya Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya. Diselenggarakan oleh Forum Masyarakat Kelurahan untuk jumlah pengurus ada 39 orang, Kelurahan Sambongjaya terdiri dari tenaga ahli yaitu Tenaga Kesehatan kelurahan serta 97 kader ada 15 Rukun Warga. Ini merupakan jumlah yang cukup untuk mewujudkan kelurahan siaga aktif yang beroperasi. Faktanya, kader kesehatan telah melakukan tugasnya dengan baik dan terdapat 16 tempat pelaksanaan posyandu.
- c. Sarana dan Prasarana  
Fasilitas yang dimiliki Kelurahan Sambongjaya dalam pengembangan kelurahan siaga aktif untuk Posyandu yang sudah memiliki bangunan ada di 7 Rukun Warga yaitu di Rukun Warga 03, Rukun Warga 09, Rukun Warga 06, Rukun Warga 14, Rukun Warga 15, Rukun Warga 08 dan Rukun Warga 12 dan yang lainnya belum memiliki sarana yang tetap.

Kelurahan Sambongjaya tidak memenuhi sumber-sumber kebijakan secara menyeluruh dikarenakan tidak ada pendanaan yang mendukung tetapi mempunyai Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi, serta Sarana yang ada di Kelurahan Sambongjaya.

## **3. Komunikasi Antarorganisasi dan Kegiatan Penegakkan**

Penerapan yang baik jika mereka yang memahami langkah-langkah dan tujuan. Atas dasar hal tersebut, Mempertimbangan langkah-langkah dan tujuan kebijakan yang mendasar, ketepatan korespondensi mereka dengan pelaksana, komitmen atau konsensus.

Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat di Kelurahan Sambongjaya dilakukan pada Musyawarah Tingkat Kelurahan. Kegiatan ini merupakan kegiatan awal musyawarah yang diselenggarakan oleh kelurahan untuk memperkenalkan mengenai program tersebut. Lurah beserta pengurus lainnya, pemangku kepentingan, unsur karang taruna dan tenaga posyandu terdiri dari Pengurus Kelurahan Siaga Aktif di Kelurahan Sambongjaya Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya.

Hasil wawancara dengan masyarakat sebagai penerima kebijakan langsung di kelurahan menerangkan bimbingan teknis ini telah dijalankan, Kemudian informan Ketua Program Kelurahan Siaga Aktif mengungkapkan: Upaya pihak kelurahan atau pun yang dilakukan oleh pengurus untuk memberi pemahaman terhadap masyarakat mengenai Program Kelurahan Siaga Aktif ini perlu jenjang jadi tidak bisa dilaksanakan secara individu jadi harus melibatkan RT RW. contohnya kader – kader yang memberikan informasi tentang program – program tersebut atau PKK, pokoknya semua yang ada di kelurahan itu semua terlibat begitu MUI juga ikut.

Mengenai variabel ini pihak Kelurahan maupun Pengurus Program Desa Peringatan Aktif telah dilakukan semaksimal mungkin agar masyarakat memahami program tersebut. Kelurahan membentuk Forum Masyarakat Kelurahan sebagai Koordinator Kesehatan Kelurahan bekerja sama dengan petugas Poskesdes untuk melakukan langkah-langkah dasar dan tujuan kebijakan Kelurahan Siaga Aktif di Kelurahan Sambongjaya Kecamatan Mangkubumi. Tiga lembaga dengan karakteristik yang berbeda harus saling bertukar informasi mengenai standar tujuan kebijakan agar tidak bingung dalam implementasinya.

#### **4. Karakteristik Instansi Pelaksana**

Pelaksanaan program Kelurahan Sambongjaya sebagai organisasi pelaksana utama adalah Forum Masyarakat Kelurahan dibawah naungan Pihak Kelurahan. Kedua instansi ini berperan penting dan saling terkait satusama lain dalam pelaksanaan program desa dan kelurahan siaga aktif di Kelurahan Sambongjaya Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya. Berikut Penjelasannya :

a. Forum Masyarakat Kelurahan di Kelurahan Sambongjaya yaitu kegiatan penyelenggara yang sudah menjalankan kewajiban secara maksimal karena sudah memenuhi Survei Mawas Diri, Melakukan pendataan PHBS, Kadarzi, Kesling, KIA/KB, Penyakit Menular dan Tidak Menular serta Musyawarah Masyarakat Kelurahan serta musyawarah koordinasi secara berkala. Berdasarkan tupoksi forum Masyarakat Kelurahan Sambongjaya merupakan salah satu faktor yang memperlancar pelaksanaan fungsi Forum Masyarakat Kelurahan. Agar Pelaksanaan kelurahan siaga aktif di Kelurahan Sambongjaya menjadi berjalan dengan lancar dan mudah mencapai tujuan program. Dalam menyukseskan program tersebut kader juga ikut andil dalam proses pelaksanaan teknis sehingga program ini diharapkan berjalan dengan baik

b. Kelurahan Sambongjaya telah memenuhi tugasnya dengan melaksanakan program kelurahan siaga aktif. Kelurahan Sambongjaya telah mengeluarkan peraturan sebagai dasar pembentukan Kelurahan Siaga Aktif. Untuk menjamin keberlanjutan program, Kelurahan Sambongjaya juga telah membantu menyediakan fasilitas untuk yang mendukung pelaksanaan program. Karakteristik organisasi yang memimpin pelaksanaan program kelurahan siaga aktif yaitu Forum Masyarakat Kelurahan sebagai penunjang berhasilnya penent pelaksanaan kegiatan.

Peneliti menyimpulkan forum masyarakat yang melibatkan pengurus dan pejabat merupakan aktor utama dalam pelaksanaan program desa peringatan aktif ini dan kegiatannya sesuai dengan misi masing-masing seksi untuk melaksanakannya. tugas dengan benar sehingga tujuan dari program Desa Siaga Aktif ini dapat tercapai. Berdasarkan penelitian dari sudut variabel yang terkait dengan badan pelaksana dilakukan secara maksimal. Instansi dalam pelaksanaan merupakan ketentuan yang tetap mempunyai ciri, sendiri-sendiri.

Pihak pelaksana berperan sebagai pengayom, koordinator atau penggerak masyarakat, dan dewan pengurus serta secara terus menerus memantau untuk mengevaluasi program-

program yang dilaksanakan oleh Forum Masyarakat Desa dan Puskesmas sebagai organisasi pelaksana. Puskesmas sendiri bertindak sebagai pembina dan pendamping kesehatan masyarakat.

#### **5. Kondisi Ekonomi, Sosial dan Politik**

Didalam pelaksanaan kegiatan, Kelurahan Sambongjaya membantu terlaksananya programnya. Ini diakui sepenuhnya didukung oleh masyarakat dan kelurahan sebagai berikut:

- a. Kondisi sosial masyarakat Kelurahan Sambongjaya tidak mempengaruhi pelaksanaan program ini, dan dampak terhadap masyarakat tidak terlalu besar karena keadaan sebenarnya bukan bertentangan dengan awal dan sesudah pelaksanaan strategi ditetapkan.
- b. Kondisi ekonomi di dalam masyarakat Sambongjaya sangat berpengaruh terhadap berjalannya program ini, yang tercermin dari adanya swadaya masyarakat agar kebijakan ini diterapkan di Kelurahan Sambongjaya. Sedangkan dampak ekonomi setelah kebijakan tersebut disahkan juga berdampak baik bagi masyarakat. Masyarakat meyakini bahwa kesehatan merupakan memecahkan persoalan yang berasal sejak dalam pribadi untuk dapat memperoleh penghasilan. Jika kebugaran membaik, masyarakat secara akan memanfaatkan kemudian berdampak serta pada situasi ini. Penulis melakukan wawancara dengan Bidan Kelurahan berikut penjelasannya Kesejahteraan secara mempengaruhi kemajuan ekonomi daerah setempat, memang jika orang yang kuat dapat menghasilkan uang, dengan asumsi bahwa ia akan sakit bagaimana mereka akan mencari uang itu tentang pekerjaan. Masyarakat kelurahan jelas sekali kesehatan itu dibutuhkan. Pernyataan tersebut diperkuat oleh selaku Sekretaris Kelurahan yaitu: Ekonomi di Kelurahan ini sudah jelas meningkat, disamping memang kalau kesehatannya yang selalu membaik, itu akan sangat membantu perekonomian mereka sendiri.
- c. Dibandingkan dengan kondisi politik, ada pengaruh dan dampak yang besar terhadap Pihak Kelurahan. Hal Ini dibuktikan dengan tumbuhnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan Kelurahan yang kini dijalankan oleh Lurah. Dengan demikian, kelurahan diuntungkan dari sisi politik. Informan Sekretaris Kelurahan Sambongjaya menerangkan : Tentu saja, dari sisi ekonomi, program ini tidak memberikan kontribusi apa pun kepada pemerintah Kelurahan, tetapi dalam keadaan program ini telah membantu kelurahan dalam menjaga kesejahteraan kelurahan, membantu sejauh mana tentang kesejahteraan dengan langsung ke kelurahan dan membantu administrasi kelurahan. Begitu juga dalam hal akuntabilitas, hadirnya Forum Masyarakat kelurahan dan Pusat Kesehatan Masyarakat menambah keyakinan masyarakat kepada Kelurahan karena kondisi kesehatan di kelurahan bisa teratasi.

#### **6. Disposisi Pelaksana**

(Van Meter, 1975, hal. 472) berpendapat bahwa setiap bagian dari model yang dibicarakan sebelumnya harus dipisahkan melalui pandangan pelaksana di tempat di mana pengaturan itu dibuat. Mereka kemudian, pada saat itu, mengenali tiga komponen reaksi pelaksana yang mungkin mempengaruhi kapasitas dan kesiapan mereka untuk melaksanakan pengaturan, khususnya: persepsi (pengenalan, mencari tahu) tentang strategi, jenis reaksi terhadapnya (pengakuan, kurangnya pemahaman). bias, pemecatan) dan kekuatan reaksi. Arah kecenderungan pelaksana terhadap langkah-langkah dan target dasar juga penting. Pelaksana mungkin mengabaikan untuk menjalankan strategi dengan tepat dengan alasan bahwa mereka menolak tujuan yang dirangkum dalam pengaturan tersebut. Sikap ini mengacu pada keinginan pelaksana pada prinsip dan tujuan strategi. dapat dihubungkan dengan informasi dan pengertian tentang pendekatan serta pengakuan dan penolakan strategi. Pelaksana Kelurahan Siaga Aktif di Kelurahan Sambongjaya jelas memahami dan menanggapi tujuan program, sehingga mendukung terlaksananya program yang terkendali

Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Ketua Program Kelurahan Siaga Aktif Kelurahan Sambongjaya Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya pada Wawancara yakni sebagai berikut :

“Saya sebagai ketua pelaksana mengerti akan standar dan tujuan kebijakan program kelurahan siaga aktif ini. dan juga saya sudah menerima SK dan juga ada pedoman umum tentang kelurahan siaga aktif”.

Pernyataan diperkuat oleh Sekretaris Kelurahan pada Wawancara yakni sebagai berikut:

“Pihak kelurahan tentu memahami adanya program ini, mengingat pada saat perumusannya mencakup seluruh perangkat kelurahan, maka jelas kelurahan mengetahuinya, saat ini pada akhirnya bergantung pada masing-masing pihak untuk memahaminya, namun para staf yang langsung terlibat dengan program ini sekarang sadar akan kehadiran program ini. khususnya Forum Masyarakat Kelurahan sebagai pelaksanaanya”.

Dari hasil pembahasan tersebut, cenderung berasalan bahwa kecenderungan ini dapat disebabkan oleh informasi dan pemahaman strategi serta pengakuan dan penolakan pendekatan. Pelaksana kelurahan siaga aktif di Kelurahan Sambongjaya telah memahami dan mengerti tujuan program dengan baik, sehingga dapat membantu kemajuan pelaksanaan program.

## **KESIMPULAN**

Implementasi Kebijakan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1529/MENKES/SK/X/2010 Tentang Pedoman Umum Pengembangan Kelurahan Siaga Aktif di Kelurahan Sambongjaya sudah berjalan dengan cukup baik. Implementasi karakter enam faktor dikemukakan Van Meter dan Van Horn masih dalam keadaan dilakukan dengan cara maksimal.

### **1. Standar dan Tujuan Kebijakan**

Ketepatan indikator keberhasilan Kelurahan siaga aktif bahwa persyaratan utama dalam standar dan tujuan kebijakan mengalami kesesuaian dalam implementasinya di Kelurahan Sambongjaya Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya, telah memenuhi 8 indikator keberhasilan Program yang tertera pada lampiran keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1529/MENKES/SK/X/2010 Tentang Pedoman Umum Pengembangan Kelurahan Siaga Aktif.

### **2. Sumber-sumber Kebijakan**

Sumber Kebijakan seperti dana, sumber daya manusia dan fasilitas telah terimplementasi di Kelurahan Sambongjaya. Misalnya, memiliki Sumber Daya Manusia berkompeten, serta sarana yang telah tersedia untuk mendukung terlaksananya dengan baik di Kelurahan Sambongjaya Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya.

### **3. Komunikasi Antarorganisasi dan Kegiatan Penegakkan**

Musyawarah yang diselenggarakan Kelurahan Sambongjaya dilakukan pada Musyawarah Tingkat Kelurahan. Kegiatan ini merupakan kegiatan awal lanjutan di kelurahan bagi memperkenalkan mengenai Kelurahan Siaga Aktif serta didampingi pengurus Kelurahan Siaga Aktif di Kelurahan Sambongjaya Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya.

### **4. Karakteristik Organisasi Pelaksana**

Kinerja karakteristik organisasi terlaksana dengan baik. Badan atau instansi yang terlibat dalam penyelenggaraan instansi ini mengacu pada peraturan yang telah dibuat sesuai dengan tugas. Pelaksana program ini khususnya Forum Masyarakat Kelurahan mempunyai peran sebagai koordinator atau penggerak Program Kelurahan Siaga Aktif di Kelurahan Sambongjaya Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya.

### **5. Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik**

Keadaan di lapangan ini diwujudkan dengan adanya dukungan masyarakat dan kelurahan:

- a. Kondisi sosial masyarakat Kelurahan Sambongjaya tidak mempengaruhi pelaksanaan program ini, dan dampak terhadap masyarakat tidak terlalu besar karena keadaan yang sebenarnya bertentangan dengan awal dan sesudah pelaksanaan ini ditetapkan
- b. Keadaan ekonomi di lingkungan masyarakat Sambongjaya sangat berpengaruh terhadap berjalannya program ini, yang tercermin dari adanya swadaya masyarakat agar

kebijakan ini diterapkan di Kelurahan Sambongjaya. Sedangkan dampak ekonomi setelah kebijakan tersebut disahkan juga berdampak baik bagi masyarakat. Masyarakat meyakini bahwa kesehatan merupakan pemecahan persoalan yang berasal untuk memperoleh penghasilan. Jika tubuh membaik, masyarakat akan melakukan pekerjaan dan berdampak pada situasi ini.

c. Dibandingkan dengan kondisi politik, ada pengaruh dan dampak yang besar terhadap Pihak Kelurahan. Hal ini dibuktikan dengan tumbuhnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan Kelurahan yang kini dijalankan oleh Lurah. Dengan demikian, kelurahan diuntungkan dari sisi politik.

6. Disposisi Pelaksana

Disposisi implementasi mengacu pada kecenderungan organisasi pelaksana kepada tujuan kebijakannya. Pemahaman ini dapat dikaitkan dengan pengertian bagaimana kebijakan ini berlangsung. Pelaksana kelurahan siaga aktif di Kelurahan Sambongjaya jelas mengerti sehingga mendukung pelaksanaan program yang berkelanjutan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Kusnandar, I. (2010). *Kebijakan Publik dari Formulasi, Implementasi ke Evaluasi*. Multazam.
- Suharno. (2010). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik Kajian Proses dan Analisis Kebijakan*. Yogyakarta: UNY PRESS.
- Suharto, E. (2005). *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Van Meter. (1975). *Administration & Society The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework*.
- Winarno, B. (2014). *Kebijakan Publik Teori, Proses, Dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS (Center of Academic Publishing Service).